



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MAMUJU**  
**NOMOR : 188.45/06 /KPTS/1 /2022**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KAB. MAMUJU TAHUN 2022**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KAB. MAMUJU**

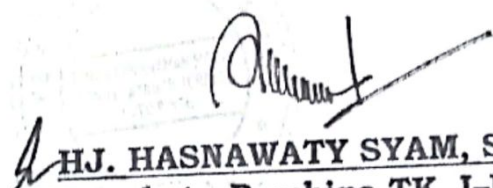
- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU.
- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada Tanggal : 21 Januari 2022  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KAB.MAMUJU

  
**HJ. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si**  
Pangkat : Pembina TK. I-IV/b  
NIP : 19680928 200604 2 002

**Tembusan:** Disampaikan Kepada Yth,

1. BUPATI Mamuju di Mamuju;
2. Kepala BPKAD Kab. Mamuju di Mamuju;
3. Kepala BKPP Kab.Mamuju di Mamuju ;
4. Kepala Bagian Monitoring & Evaluasi Setda Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju;
6. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju ;

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Perizinan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Mamuju  
 Nomor : 188.45/ 06 /KPTS/1 /2022  
 Tanggal : 21 Januari 2022

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022**

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju  
 Tujuan OPD : Meningkatkan Investasi Daerah  
 Indikator Tujuan : Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA  
 Sasaran Strategis : Target : 15 %

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal
3. Terselenggaranya Birokrasi DPMPTSP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI	KET
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	Milyar/Rupiah	325 Milyar	$\frac{\text{Capaian Realisasi Investasi}}{\text{Target Realisasi Investasi}} \times 100\%$	Eselon II
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	90	Nilai Skor IKM	Eselon II
3.	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	Ada/Tidak	Eselon II

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DI LINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. MAMUJU TAHUN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	FORMULASI	KET
1.	Terciptanya Iklim yang Kondusif untuk Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal	Persen	100	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Tersedia}}{\text{Target Dokumen Penanaman Modal}} \times 100\%$	Eselon III
2.	Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peningkatan Investor	Investor	39	Jumlah Investor	Eselon III
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen	100	$\frac{\text{Jumlah data Izin Tahun } n - \text{Jumlah data Izin Tahun } n - 1}{\text{Jumlah data Izin tahun } n - 1} \times 100\%$	Eselon III
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Persen	50	$\frac{\text{Jumlah Perizinan Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi yang diawasi}}{\text{Total Perizinan Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi}} \times 100\%$	Eselon III
5	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase laporan data perizinan dan non perizinan	Persen	100%	Jumlah Laporan yang tersedia (12 laporan)	Eselon III
6	Tercapainya Target Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Secara Akuntabel	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	$\frac{\text{realisasi kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah}}{\text{jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah}} \times 100\%$	Eselon III
7	Tersedianya penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	Persen	100	$\frac{\text{jumlah regulasi yang tersedia}}{\text{jumlah target}} \times 100$	Eselon Iv/Fungsional

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	FORMULASI	KET
8	Ditetapkannya kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	3	Jumlah Regulasi yang tersedia	Jabatan Fungsional
9	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	Persen	100	$\frac{\text{jumlah peta potensi yang tersedia}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$	Jabatan Fungsional
10	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Jumlah Perda yang tersedia	Jabatan Fungsional
11	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	Jumlah Dokumen Peta Potensi yang tersedia	Jabatan Fungsional
12	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti	Persen	33	$\frac{\text{Jumlah Promosi yang diikuti}}{\text{Jumlah rencana promosi yang ada}} \times 100\%$	Jabatan Fungsional
13	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Jumlah Perda yang tersedia	Jabatan Fungsional
14	Terlaksananya Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	Persen	100	Semua Perizinan Umum yang Terlayani dengan online	Jabatan Fungsional
15	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	85	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Izin	Jabatan Fungsional
16	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Keg. Usaha	360	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jabatan Fungsional

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	FORMULASI	KET
	Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Penanaman Modal				
17	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	22	Jumlah layanan aduan dan Konsultasi yang sudah ditindaklanjuti	Jabatan Fungsional
18	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Keg. Usaha	3	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jabatan Fungsional
19	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM ( Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Persen	70	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Jabatan Fungsional
19	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keg. Usaha	12	Jumlah Kegiatan Usaha yang telah dilakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jabatan Fungsional
20	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	1	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penanaman modal	Jabatan Fungsional
21	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Keg. Usaha	12	Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan	Jabatan Fungsional
22	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	Persen	12	<u>Jumlah laporan yang tersedia dibagi target (12 laporan)</u> X 100%	Jabatan Fungsional

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	FORMULASI	KET
23	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	12	Jumlah Dokumen yang tersedia	Jabatan Fungsional
24	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	Ada/Tidak	Eselon IV
25	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Ada/Tidak	Eselon IV
26	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Ada/Tidak	Eselon IV
27	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	Ada/Tidak	Eselon IV
28	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Ada/Tidak	Eselon IV
29	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	Ada/Tidak	Eselon IV
30	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Dokumen	1	Ada/Tidak	Eselon IV



NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	FORMULASI	KET
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
31	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	Ada/Tidak	Eselon IV
32	Tersedianya dokumen pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	Ada/Tidak	Jabatan Fungsional
33	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	Orang/Bulan	38	Ada/Tidak	Jabatan Fungsional
34	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Ada/Tidak	Jabatan Fungsional
35	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	2	Ada/Tidak	Jabatan Fungsional
36	Tersedianya dokumen pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	100	Jumlah Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dibagi target x 100%	Eselon IV
37	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4	Ada/Tidak	Eselon IV
38	Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Kepegawaian	Persen	100	Jumlah penyediaan jasa administrasi yang ada di kantor dibagi target x100%	Eselon IV
39	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	38	Jumlah ASN dan kelengkapan administrasi kepegawaian	Eselon IV

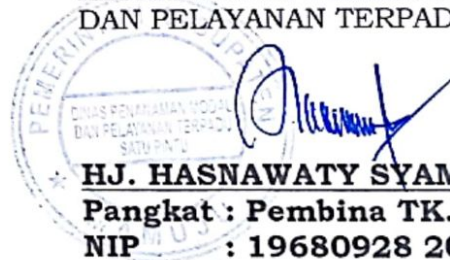
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	FORMULASI	KET
40	Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persen	100	Jumlah penyediaan dokumen administrasi dibagi target x 100%	Eselon IV
41	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	Ada/Tidak	Eselon IV
42	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Ada/Tidak	Eselon IV
43	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	Ada/Tidak	Eselon IV
44	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	$\frac{\text{Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan}}{\text{Jumlah Target Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah}} \times 100\%$	Eselon IV
45	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	Ada/Tidak	Eselon IV
46	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Ada/Tidak	Eselon IV
47	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Ada/Tidak	Eselon IV
48	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Persen	100	$\frac{\text{Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara}}{\text{Jumlah Target Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah}} \times 100\%$	Eselon IV

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	FORMULASI	KET
49	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	Unit	14	jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Eselon IV
50	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	Jumlah peralatan yang dipelihara	Eselon IV

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**HJ. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si** †  
Pangkat : Pembina TK. I - IV/a  
NIP : 19680928 200604 2 002